

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku etis konsultan pajak telah menjadi perhatian yang semakin berkembang. Kantor konsultan akhir-akhir ini juga telah diperiksa untuk kasus penghindaran pajak. Hal ini meningkatkan isu yang terkait dengan etika dan profesionalisme konsultan pajak. Beberapa konsultan pajak di duga telah mengabaikan kepentingan publik di atas kepentingan kliennya. Dengan demikian keraguan masyarakat akan profesionalisme konsultan pajak akan meningkat. Konsultan Pajak akan menghadapi tantangan yang semakin berat di masa-masa yang akan datang. Konsultan Pajak memiliki sensitifitas etika yang lebih tinggi dibandingkan profesi lain, tidak lain karena adanya kode etik yang harus ditaati dan dilema etika yang sering dihadapi. Tetapi tidak jarang dari konsultan pajak yang melakukan manipulasi yang melanggar kode etik yang seharusnya dihindari. Memulihkan citra profesi merupakan tantangan bersama bila ingin profesi tersebut masih dihormati oleh publik (Agoes dan Ardana, 2009:159).

Dalam pemberitaan tampak kasus perpajakan yang melibatkan konsultan pajak karena pengambilan keputusan tidak etis yang dilakukan dengan memfasilitasi / membantu wajib pajaknya dalam menghindari pajak bahkan menggelapkan pajak. Menurut definisi dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia, pasal 1 dalam Loen dan Meliana (2009: 4) mengungkapkan bahwa konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam

lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasanya kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan. Menits (2013) mengungkapkan Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan bahwa peran konsultan pajak sangat penting dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam bidang perpajakan tetapi tugas konsultan pajak bukan untuk membela wajib pajak dan konsultan pajak bukan mencari celah hukum melainkan untuk membantu masyarakat mengisi SPT dengan benar.

Keterkaitan perilaku manusia tidak akan terlepas dari unsur etika yang ada dalam dirinya sehingga dengan keahlian yang dimilikinya pasti terdapat etika yang mendasarinya (Ernawan, 2007: 122). Dalam setiap profesi tentunya memiliki etika dan etika tersebut dikodifikasikan dalam kode etik profesinya. Profesi konsultan pajak tentunya memiliki etika yang terdapat dalam Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan jika sudah menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) diharuskan untuk tunduk pada kode etik tersebut (Loen dan Meliana, 2009: 19). Dengan adanya kode etik tersebut tentunya seorang konsultan pajak seharusnya mampu untuk mengambil Keputusan etis dengan tidak membantu wajib pajaknya melakukan penghindaran pajak.

Faktor karakteristik moral individu yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis antara lain yaitu tahapan pengembangan moral, *gender*, *locus of control*, dan sifat *machiavellian*. Sedangkan faktor lingkungan organisasional, kultural atau situasional yang dianggap berpengaruh antara lain yaitu persaingan,

pengaruh manajerial organisasi, kebijakan organisasi, pengalaman kerja, dan sistem *reward*. Variabel-variabel tersebut diprediksi memberikan pengaruh pada pengambilan keputusan etis seorang individu (Purnamasari,2006).

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh karakteristik personal individu yang dapat mempengaruhi keputusan etis. Keputusan etis tersebut yang kemudian akan mempengaruhi niat untuk berpartisipasi dalam penghindaran pajak oleh konsultan pajak. Faktor karakter personal yang akan diteliti antara lain sifat *machiavellian*, dan persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Shafer dan Simmons (2008) yang meneliti mengenai hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan, sifat *machiavellian* dan penghindaran pajak pada profesional pajak Hong Kong mengungkapkan profesional pajak yang memiliki persepsi kurang mementingkan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan kemungkinan besar profesional pajak tersebut akan melakukan penghindaran pajak. Seperti profesional pajak yang meyakini bahwa kepentingan utama perusahaan adalah meningkatkan laba perusahaan tanpa memperhitungkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat, serta kualitas lingkungan maka profesional pajak tersebut akan menganggap wajar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sebaliknya, apabila profesional pajak percaya bahwa kepentingan ekonomi jangka panjang perusahaan dicapai dengan memegang kuat nilai etika dan reputasi tanggung jawab sosial, maka mereka cenderung tidak akan melakukan penghindaran pajak khususnya dalam menghadapi tekanan wajib pajak yang ingin meminimalisasi pajak.

Penguasaan keterampilan dan pengetahuan tidaklah cukup bagi konsultan pajak untuk menjadi profesional. Pengetahuan dan pemahaman atas etika dapat menjadi dasar membuka kesadaran diri konsultan pajak untuk berperilaku etis. Sedangkan mengenai sifat *machiavellian* seperti dalam Leary dan Hoyle (2009: 94), pada dasarnya machiavellianisme dibangun untuk memahami kepribadian yang manipulatif, dingin, dan penuh perhitungan. Seseorang dengan orientasi machiavellianisme dikenal sebagai *machiavellian*. Dibandingkan dengan orang tipe *mach* rendah, orang tipe *mach* tinggi memiliki keinginan melakukan manipulasi yang lebih tinggi sehingga memungkinkan seorang konsultan pajak melakukan manipulasi dalam membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (2003) yang dikutip Adriana (2013:6) menyatakan bahwa kecenderungan mengambil risiko adalah satu aspek yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Setiap keputusan terdapat beberapa kemungkinan atau alternatif untuk dipilih. Konsekuensi-konsekuensi terkandung dalam setiap alternatif keputusan. Konsultan pajak yang handal dalam melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) akan memberikan rekomendasi yang agresif terhadap klien pajaknya. Widyaningrum dan Eddy (2012) melakukan penelitian mengenai analisis sifat *Machiavellian* dan pembelajaran etika terhadap sikap etis akuntan dan mahasiswa akuntansi. Dari hasil penelitian, adanya pengaruh yang signifikan dari sifat *Machiavellian* terhadap kecenderungan perilaku etis akuntan dan mahasiswa akuntansi. Selain itu hasil yang menunjukkan mahasiswa akuntansi yang sudah menempuh mata kuliah etika lebih

memegang kuat nilai etika daripada yang belum menempuh mata kuliah etika. Pada penelitian Jiwo (2011), mengenai analisis faktor-faktor individual dalam pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak menyimpulkan bahwa konsultan pajak di Kantor Akuntan Publik memiliki pemahaman etika yang baik dalam menjalankan pekerjaannya. Statistik pengujian menunjukkan bahwa konsultan pajak relatif memiliki sifat *machiavellian* yang rendah, persepsi terhadap pentingnya etika dan tanggung jawab sosial yang baik, serta tingkat pertimbangan etis yang cukup tinggi. Penelitiannya juga menunjukkan adanya pengaruh dari persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dan sifat *machiavellian* terhadap pengambilan keputusan etis. Penelitian-penelitian yang analisisnya menggunakan analisis kuantitatif ini semuanya menggunakan metode survey dalam pengumpulan datanya, sementara unit analisisnya adalah individu.

Penelitian yang dilakukan oleh Shafer dan Simmons (2008) dan Jiwo (2011) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor individual terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak saat mengalami dilema etika untuk melakukan atau tidak melakukan penghindaran pajak berdasarkan pemahaman konsultan pajak mengenai etika, tanggung jawab sosial dan keinginan konsultan pajak untuk melakukan manipulasi. Alasan dilakukannya penelitian ini yaitu pertama, karena penelitian mengenai persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, sifat *machiavellian*, dan preferensi risiko belum banyak dilakukan di Indonesia, terutama penelitian yang berfokus pada konsultan pajak dan menghubungkannya dengan penghindaran pajak. Kedua, karena di Indonesia saat ini masih terjadi krisis kepercayaan terhadap profesi konsultan pajak, yang

disebabkan banyaknya kasus pelanggaran profesi. Ketiga, diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengendalikan perilaku etis para konsultan pajak, di mana salah satu upayanya dapat dilakukan dengan mengendalikan faktor-faktor pendorong kepribadian *machiavellian*, meningkatkan kepribadian moral dengan mengutamakan nilai etika dan menguatkan keputusan etis konsultan pajak. Sejumlah penelitian telah menganalisis faktor-faktor individual yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis, namun demikian tidak banyak yang mengaitkan hal tersebut dengan kasus perpajakan yang saat ini tidak jarang dilakukan oleh konsultan pajak. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini diberi judul “ANALISIS PENGARUH PERSEPSI PERAN ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL, SIFAT *MACHIAVELLIAN*, DAN PREFERENSI RISIKO TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS OLEH KONSULTAN PAJAK DI WILAYAH JAKARTA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah pengambilan keputusan etis yang dilakukan oleh konsultan pajak di wilayah Jakarta. Sehingga penelitian ini melihat pengaruh faktor-faktor pengambilan keputusan etis di konsultan pajak.

C. Ruang Lingkup

Dalam upaya melakukan penelitian terhadap konsultan pajak, maka penelitian ini hanya difokuskan pada konsultan pajak di wilayah Jakarta dan penulis

membatasi ruang lingkup penulisan hanya mengenai pengaruh persepsi peran etika dan tanggung jawab sosial, sifat *Machiavellian*, dan preferensi risiko terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak di wilayah Jakarta.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah persepsi peran etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak di wilayah Jakarta?
2. Apakah sifat *machiavellian* berpengaruh terhadap pengambilan Keputusan etis konsultan pajak di wilayah Jakarta?
3. Apakah preferensi risiko berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak di wilayah Jakarta?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi peran etika dan tanggung jawab sosial terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak di wilayah Jakarta
2. Untuk mengetahui pengaruh sifat *Machiavellian* terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak di wilayah Jakarta

3. Untuk mengetahui pengaruh preferensi risiko terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak di wilayah Jakarta

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Sebagai dasar untuk mengembangkan dan memperluas lebih dalam teori yang telah di pelajari.

2. Bagi konsultan pajak

Memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi bagi konsultan pajak untuk menyadari pentingnya berperilaku etis dan bertanggung jawab sosial.

3. Bagi pihak lain

Memberikan informasi kepada publik, professional akuntansi maupun mahasiswa akuntansi mengenai karakteristik yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis konsultan pajak.

F. Sistematika pembahasan

Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, ruang lingkup, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran berisi landasan teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesa.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian berisi variable penelitian dan definisi operasional variable, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab hasil dan analisis berisi deskripsi objek penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang di peroleh dari penelitian yang telah di lakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Beberapa faktor perilaku mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (2003:145-146) terdapat empat faktor perilaku yaitu nilai-nilai, kepribadian, kecenderungan untuk mengambil risiko, dan disonansi. Masing-masing faktor tersebut telah terbukti berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

- **Nilai-Nilai**

Nilai-nilai pengambilan keputusan merupakan pedoman dan keyakinan dasar yang digunakan ketika berhadapan dengan situasi dimana harus dilakukan suatu pilihan. Menurut Hartman dan Desjardins (2008:11-12) etika tidak bisa lepas dari norma dan nilai. Norma-norma membentuk panduan atau standar dalam menentukan apa yang seharusnya dilakukan, bagaimana seharusnya bertindak, dan menjadi tipe orang seperti apa. Nilai-nilai sebagai keyakinan dalam bertindak atau memilih satu cara dibandingkan yang lainnya.

Nilai-nilai berpengaruh terhadap pembentukan etika dan moral individu. Dalam melakukan suatu tindakan yang melibatkan

banyak kepentingan, seorang individu perlu mempertimbangkan aspek nilai dan dampak sosial yang akan timbul. Hal tersebut memberikan pilihan yang lebih baik dari tindakan yang tidak didasari aspek nilai etika dan moralitas. Aspek nilai memiliki hubungan terhadap tindakan yang dilakukan individu, sehingga tindakan tersebut bisa dikatakan lebih beretika dan memiliki tanggung jawab sosial. Nilai-nilai dalam etika profesi merupakan kesepakatan bersama dari pembentukan suatu profesi yang harus dipatuhi seluruh anggota didalamnya. Nilai menjelaskan suatu tindakan termasuk baik atau tidak baik untuk dilakukan.

- Kepribadian

Para pengambil keputusan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, baik secara sadar maupun secara tidak sadar. Salah satu faktor yang paling penting adalah kepribadian, yang tampak jelas dari pilihan yang dilakukan. Beberapa telaah mendalam telah menyelidiki dampak variabel kepribadian tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Indriani yang dikutip oleh Ardana, Mujiati, dan Sriathi (2013:12) “kepribadian adalah keseluruhan elemen total dari individu yang tampak dalam perbuatan, tingkah laku kecenderungan-kecenderungan sikap, dan ciri-ciri kebiasaan dalam hubungannya dengan lingkungan sekitar”.

- **Kecenderungan Mengambil Risiko**

Kecenderungan para pengambil keputusan sangat bervariasi dalam mengambil keputusan. Satu aspek khusus dari kepribadian ini sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Menurut Ardana, Mujiati, dan Sriathi (2013:15) “pengambilan risiko adalah kepribadian yang menakar segala keputusannya dengan risiko”. Individu yang memiliki keinginan memperoleh hasil tinggi akan berani mengambil risiko tinggi (agresif), sedangkan individu dengan tingkat hasil rata-rata akan mengambil risiko yang lebih rendah (konservatif).

2. Penghindaran Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam Zain (2010: 2), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. (1990) dalam Mardiasmo (2011:1) menyebutkan bahwa pajak iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan Prof. Dr. P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2008:2), pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang yang oleh wajib membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang)

dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam pembiayaan negara, dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, sebagian besar warga negara tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian disebut perlawanan terhadap pajak (Sari, 2013: 50). Perlawanan terhadap pajak yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kondisi negara dan masyarakat, maupun oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari atau tidak mempersulit pemasukan pajak dalam kas negara (Pohan, 2013: 22).

3. Persepsi Peran Etika dan Tanggung Jawab Sosial

Dalam Robbins (2008: 169), persepsi adalah Proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera dalam rangka memberikan makna pada lingkungan mereka. Bimo Walgito (2010: 89) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti. Persepsi seseorang itu penting dalam studi perilaku individu karena perilaku manusia didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa realitas yang ada. Persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan mendasari bagaimana dan dengan apa

seseorang akan bertindak. Persepsi disini berhubungan dengan etika dan tanggung jawab sosial.

3.1 Etika dan Tanggung Jawab Sosial

Etika berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manusia dan masyarakat seperti antropologi, psikologi, politik maupun ekonomi. Menurut Ludigdo (2007: 21), etika adalah pemikiran dan pertimbangan moral yang memberikan dasar bagi seseorang maupun sebuah komunitas dalam melakukan suatu tindakan. Dan Bertens (2013: 5) mengartikan etika sebagai nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan pengertian moralitas didefinisikan oleh Ernawan (2007: 2), sebagai berikut : “Suatu sistem nilai yang memberikan petunjuk konkrit tentang bagaimana harus bertindak yang baik dan bagaimana cara menghindari tindakan yang tidak baik.” Bertens (2013: 6), mendefinisikan moralitas adalah “Sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.”

Etika dan moralitas memiliki arti yang sama, namun dalam pemakaian sehari-harinya ada sedikit perbedaan. Moralitas langsung menunjukkan inilah caranya untuk bertindak sedangkan etika justru mempersoalkan apakah harus dengan cara ini untuk bertindak, jadi etika merupakan sikap kritis masyarakat dalam merealisasikan moralitas (Ernawan, 2007: 4). Isu penting yang tengah menjadi perhatian dunia usaha baik dalam maupun luar negeri adalah masalah yang berkaitan dengan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap eksistensinya dalam masyarakat, yang

dikenal dengan *corporate social responsibility* (CSR). Motivasi utama setiap perusahaan yang tidak memperhatikan dan tidak menerapkan nilai-nilai moral, hanya berorientasi pada laba (tujuan) jangka pendek sudah tentu adalah meningkatkan keuntungan semata (Ernawan, 2007: 108). Saat ini konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan respon dari tindakan perusahaan yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Dalam Wibisono (2007) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen bisnis untuk secara terus menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal dan masyarakat luas pada umumnya (Agoes dan Ardana, 2009: 89). Keraf (1998) dalam (Agoes dan Ardana, 2009: 93). mengungkapkan alasan-alasan yang menentang adanya konsep tanggung jawab sosial perusahaan diantaranya :

- a. Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga sosial.
- b. Perhatian manajemen perusahaan akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan.
- c. Biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk sehingga akan merugikan masyarakat.
- d. Tidak semua perusahaan mempunyai tenaga terampil dalam kegiatan sosial.

Sementara itu, alasan-alasan yang mendukung konsep tanggung jawab sosial perusahaan yaitu :

- a. Kesadaran yang meningkat dan masyarakat yang semakin kritis terhadap dampak negatif dari tindakan perusahaan yang merusak alam serta merugikan masyarakat sekitarnya.
- b. Sumber daya alam yang semakin terbatas.
- c. Menciptakan lingkungan sosial yang baik.
- d. Pertimbangan yang adil dalam memikul tanggung jawab dan kekuasaan dalam memikul beban sosial dan lingkungan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
- e. Menciptakan keuntungan jangka panjang.

Seperti diungkapkan di atas, setiap individu masih memiliki pandangan yang berbeda mengenai pentingnya sebuah etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Shafer dan Simmons (2008) yang meneliti mengenai pengaruh antara tanggung jawab sosial perusahaan, sifat *machiavellian* dan penghindaran pajak pada profesional pajak Hong Kong mengungkapkan profesional pajak yang kurang mementingkan tanggung jawab sosial perusahaan kemungkinan besar profesional pajak tersebut akan mengambil keputusan tidak etis dengan melakukan penghindaran pajak.

Seperti profesional pajak yang meyakini bahwa kepentingan utama perusahaan adalah pemegang saham saja dan hanya berorientasi

meningkatkan laba perusahaan tanpa memperhitungkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat, serta kualitas lingkungan maka profesional pajak tersebut akan menganggap wajar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Standar Profesi Konsultan Pajak (SPKP) dalam IKPI (2010), menyebutkan bahwa selain bertanggung jawab terhadap klien seharusnya konsultan pajak juga memiliki tanggung jawab terhadap :

- a. Masyarakat
- b. Profesinya (tunduk pada Standar Profesi dan Kode Etik)
- c. Dirinya sendiri
- d. Organisasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
- e. Otoritas Pajak
- f. Setiap rekan dalam anggota persekutuan profesi
- g. Pemberi kerja bila bekerja pada suatu Kantor Konsultan Pajak (KKP)

Penguasaan keterampilan dan pengetahuan tidaklah cukup bagi konsultan pajak untuk menjadi profesional. Karakter diri yang dicirikan oleh ada dan tegaknya etika profesi merupakan hal penting yang harus dikuasanya juga. Pengetahuan dan pemahaman atas etika dan tanggung jawab sosial dapat menjadi dasar membuka kesadaran diri akuntan untuk berperilaku etis. Dalam Bertens (2013: 192), disebutkan 2 paham mengenai etika. Sikap / penilaian terhadap etika dan tanggung jawab sosial harus dipandang baik secara :

- Deontologis (sikap terhadap etika dengan menilai apakah etis atau tidak etis jika bertindak sesuai kewajiban / prinsip / legalitas saja tanpa melihat konsekuensi yang timbul dari tindakan tersebut) seperti dalam kasus perpajakan, pada konsultan pajak yang berpikir bahwa meminimalisasi pajak / melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah hukum dianggap baik / etis karena legal / tidak melanggar undang-undang perpajakan walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan makna yang ada dalam kode etik dan mengakibatkan tidak maksimalnya pendapatan pajak pemerintah.
- Teleologis (sikap terhadap etika dengan menilai suatu tindakan etis atau tidak etis dengan berfokus pada tujuan / akibat / konsekuensi dilakukannya tindakan tersebut tanpa mementingkan cara mencapai tujuan tersebut).

4. Sifat *Machiavellian*

4.1 Teori Politik Machiavellianisme

Paham *machiavellianism* diajarkan oleh ahli filsuf Italia yang bernama Nicolo Machiavelli (1469-1527). *Machiavellianisme* didefinisikan sebagai sebuah proses dimana manipulator mendapatkan lebih banyak *reward* dibandingkan yang dia peroleh ketika tidak melakukan manipulasi, ketika orang lain mendapatkan lebih kecil, minimal dalam jangka pendek (Christie dan Geis, 1970 dalam Purnamasari, 2006). Kohlberg menjelaskan bahwa orientasi etika mempunyai hubungan dengan dimensi-

dimensi etis seperti sifat *machiavellian*. Skala *machiavellian* ini menjadi proksi perilaku moral yang mempengaruhi perilaku pembuatan keputusan etis (Hegarty dan Sims, 1978 dan 1979 dalam Shafer dan Simmon, 2008). Individu dengan sifat *machiavellian* tinggi akan lebih mungkin melakukan tindakan yang tidak etis dibandingkan dengan individu dengan sifat *machiavellian* rendah. Christie dan Geis (1970) menyatakan bahwa kepribadian *machiavellian* sebagai suatu kepribadian antisosial, yang tidak memperhatikan moralitas konvensional dan mempunyai komitmen ideologis yang rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Gosh dan Crain (1996) dalam Purnamasari (2006) mengungkapkan bahwa individu dengan sifat *machiavellian* tinggi cenderung memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan lebih memiliki keinginan untuk tidak taat pada aturan. Sifat *machiavellian* merupakan suatu keyakinan atau persepsi yang diyakini tentang hubungan antar personal. Persepsi ini akan membentuk suatu kepribadian yang mendasari sikap dalam berhubungan dengan orang lain.

Hal lain juga diungkapkan oleh Christie (1970) dalam Shafer dan Simmons (2008), bahwa terdapat tiga hal yang mendasari sifat *machiavellian*, yaitu:

- a. Mendukung taktik manipulatif seperti tipu daya atau kebohongan,
- b. Pandangan atas manusia yang tidak menyenangkan, misalnya lemah, pengecut, dan mudah dimanipulasi,

- c. Kurangnya perhatian terhadap moral konvensional.

Penelitian yang dilakukan oleh Wirtz dan Kum (2004) dalam Shafer dan Simmons (2008) menyimpulkan bahwa berdasarkan survei kepada pekerja kantor dan masyarakat umum di Singapura, seseorang dengan tingkat *machiavellianisme* tinggi lebih mungkin untuk melakukan penipuan dalam kasus pelayanan jaminan masyarakat.

4.2 Kepribadian *Machiavellian*

Dalam (Leary dan Hoyle, 2009: 94-99), dijelaskan bahwa kepribadian *machiavellian* sebagai berikut :

- a. *Machiavellian* memiliki eksternal *locus of control* yaitu mereka mempercayai bahwa perilaku kerja dan keberhasilan tugas mereka lebih dikarenakan faktor di luar diri yaitu organisasi. Sehingga jika mereka 27 mengalami kegagalan akan menyalahkan organisasi daripada introspeksi dirinya sendiri.
- b. Orang tipe mach tinggi menganggap orang lain adalah lemah dan memiliki sedikit kontrol atas situasi mereka. Dalam bidang ini, orang tipe mach tinggi percaya bahwa mereka dapat memanipulasi orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan.
- c. Mengingat kecenderungan manipulatif mereka, orang tipe mach tinggi memiliki niat rendah menghormati kesepakatan yang telah mereka buat (Forgas, 1998) dan menjadi lebih mungkin untuk menahan informasi yang akan membahayakan mereka secara ekonomi.

- d. Dibandingkan dengan orang tipe mach rendah, orang tipe mach tinggi memberi prioritas tinggi uang, kekuasaan, dan persaingan sedangkan prioritas relatif rendah untuk membangun komunitas, cinta-diri, dan keluarga.
- e. Orang mach tinggi memiliki cara pandang adalah *goal-oriented* bukan *process-oriented* sehingga dalam mencapai tujuannya lebih menyukai jalan pintas.
- f. Orang tipe mach tinggi relatif lebih menekankan pada nilai-nilai kompetensi yaitu menilai kompetensi dan kemampuan untuk berhasil (Musser & Orke , 1992; Trapnell & Paulhus).

Machiavellian dapat disesuaikan dengan baik dan bahkan disukai. Mereka kadang-kadang disukai sebagai pemimpin tetapi dalam Wilson (1998) menunjukkan orang tipe mach yang tinggi dipandang sebagai kurang diinginkan untuk sebagian besar bentuk interaksi sosial (misalnya, kepercayaan atau mitra bisnis) melainkan sebagai mitra debat (Leary dan Hoyle, 2009: 94).

4.3 Kemampuan *Machiavellian*

Seorang *machiavellian* mempunyai kecenderungan untuk mengontrol dan mempengaruhi orang lain serta menggambarkan karakter negatif yang meliputi manipulasi, kelicikan, duplikasi atau peniruan, dan *bad faith* (keyakinan yang buruk). Dalam (Leary dan Hoyle, 2009: 94) menyebutkan bahwa *machiavellian* mempunyai kemampuan untuk " membaca pikiran " dalam arti mengantisipasi apa yang orang lain pikirkan dalam interaksi

interpersonal. Fehr (1992) dalam Leary dan Hoyle (2009: 97), mengatakan bahwa strategi persuasi, keterbukaan diri, kebohongan dan menjilat sebagai taktik pengaruh yang paling disukai oleh Orang tipe mach. Orang tipe Mach juga lebih mungkin untuk menggunakan taktik keramahan dan emosional, mungkin karena kemampuan mereka untuk tetap mengontrol emosi mereka terlepas dari situasi.

4.4 MACH IV

Richmond (2001) dalam penelitiannya menemukan bukti bahwa kepribadian individu mempengaruhi keputusan etis. Richmond menginvestigasi hubungan paham machiavellianisme yang membentuk suatu tipe kepribadian yang disebut *machiavellian* dengan kecenderungan perilaku individu dalam menghadapi dilema-dilema etika (perilaku etis). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kecenderungan sifat *machiavellian* seseorang, maka semakin mungkin untuk melakukan manipulasi.

Untuk mengukur karakter / sifat konsultan pajak, apakah mereka memiliki keinginan melakukan manipulasi yang tinggi / sifat *machiavellian* yang tinggi, digunakan alat ukur Mach IV terdiri dari 20 item instrumen berdasarkan ciri-ciri kepribadian sifat *machiavellian* di atas. Individu dengan Skala Mach IV yang tinggi mempunyai kepribadian *machiavellian* yang tinggi (Leary dan Hoyle, 2009: 103).

5. Preferensi Risiko

Definisi tentang risiko sudah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah definisi risiko menurut Soemarno (2007), yang mendefinisikan risiko sebagai suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Sedangkan menurut Subekti, definisi risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Menurut Vaughan, definisi risiko dibagi menjadi tiga definisi, yaitu *Risk is the chance of loss* (Risiko adalah kesempatan kerugian) yang berhubungan dengan suatu *exposure* (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian.

Dalam ilmu statistik, *chance* dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Sebagian penulis menolak definisi ini karena terdapat perbedaan antara tingkat risiko dengan tingkat kerugian. Dalam hal *chance of loss* 100%, berarti kerugian adalah pasti sehingga risiko tidak ada. Kemudian *Risk is the possibility of loss* (Risiko adalah kemungkinan kerugian) terdapat istilah *possibility* yang berarti bahwa probabilitas suatu peristiwa berada diantara nol dan satu. Namun, definisi ini kurang cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif. Lalu *Risk is uncertainty* (Risiko adalah ketidakpastian) yang pengertian *Uncertainty* dapat bersifat *subjective* dan *objective*. *Subjective uncertainty* merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada

pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan. *Objective uncertainty* akan dijelaskan pada dua definisi risiko berikut.

Dari uraian definisi risiko menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu kondisi yang muncul karena suatu ketidakpastian dengan suatu keadaan yang merugikan bagi individu maupun badan/perusahaan yang memungkinkan terjadi risiko. Risiko dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan bahwa suatu kondisi yang timbul karena suatu ketidakpastian yang menimbulkan ketidakpatuhan suatu wajib pajak dan merugikan bagi badan/perusahaan.

Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya (Sitkin & Pablo, 1992, dalam Aryobimo, 2012). Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko.

Kadous dan Magro (2001) menyatakan bahwa walaupun konsultan pajak memiliki tujuan untuk memberikan hasil terbaik untuk klien, namun tujuan tersebut akan diseimbangkan dengan tujuan jangka panjang atas pekerjaannya. Konsultan pajak tetap harus mempertimbangkan risiko dan penghargaan yang mereka peroleh dari segala keputusan yang diambil. Selanjutnya Kadous dan Magro (2001) menyatakan bahwa konsultan pajak menghadapi risiko biaya yang besar untuk membuat keputusan yang tidak etis. Biaya tersebut termasuk biaya penalti yang ditetapkan oleh kantor

pajak sebagai konsekuensi atas pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada serta pelanggaran ketentuan pelaporan pajak, biaya bunga atas pajak yang tidak dibayarkan, serta biaya atas kewajiban hukum apabila pelaporan yang tidak semestinya ini diperkarakan di pengadilan. Selain risiko-risiko biaya tersebut, konsultan pajak juga menghadapi risiko rusaknya hubungan dengan klien serta kehilangan reputasi apabila memberikan saran yang tidak etis kepada klien.

6. Pengambilan Keputusan Etis

Etika secara umum dapat didefinisikan sebagai satu set prinsip moral atau nilai (Arens dan Loebbecke, 2000 dalam Purnamasari dan Christmastuti, 2006). Individu maupun masyarakat memiliki serangkaian nilai yang akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan baik secara eksplisit maupun tidak. Masyarakat akan mendefinisikan nilai atau prinsip moral yang ideal menurut banyak cara, contohnya peraturan dan undang-undang, doktrin, kode etik untuk kelompok profesional, seperti akuntan, dan kode etik antar individu dalam organisasi. Perilaku etis dalam masyarakat dianggap penting untuk menjaga ketertiban masyarakat. Selain itu juga dapat menjadi perekat yang dipegang oleh semua anggota masyarakat. Pentingnya etika dalam masyarakat membuat banyak nilai etis dijabarkan secara eksplisit dalam sebuah peraturan maupun undang-undang. Namun ada juga yang tidak dijabarkan secara eksplisit, karena sifat *judgemental* yang menyertai nilai tersebut, misalnya kejujuran, loyalitas, toleransi, tanggung jawab, keadilan dan lain-lain. Robbins

(2008) menyatakan bahwa persepsi merupakan sebuah proses di mana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.

Beberapa studi menunjukkan bahwa persepsi terkait etika sangat berpengaruh terhadap sikap yang ditunjukkan oleh perilaku para profesional dalam dunia bisnis. Selain itu persepsi juga terkait dengan pembuatan keputusan individual. Seorang individu dapat mempunyai kriteria berbeda dalam membuat pilihan-pilihan etis (Robbins, 2008). Pertama adalah kriteria *utilitarian*, yaitu keputusan dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau konsekuensinya. Tujuan *utilitarianisme* adalah memberikan kebaikan terbesar untuk jumlah terbanyak. Kriteria kedua terfokus pada hak. Hal ini memungkinkan individu untuk membuat keputusan yang konsisten dengan kemerdekaan dan hak fundamental. Kriteria yang terakhir adalah keadilan. Kriteria ini mengharuskan individu untuk menentukan dan menjalankan perturan-peraturan dengan baik dan adil. Jones (1991) dalam Jiwo (2011) menyatakan bahwa keputusan etis (*etichal decision*) adalah sebuah keputusan yang baik secara moral maupun legal dapat diterima oleh masyarakat luas. Jones juga menyatakan terdapat tiga unsur utama dalam pembuatan keputusan etis, antara lain:

- *Moral issue*

Menyatakan seberapa jauh ketika seseorang melakukan tindakan, jika dia secara bebas melakukan tindakan itu maka akan mengakibatkan kerugian (*harm*) atau keuntungan (*benefit*) bagi

orang lain. Dalam bahasa yang lain adalah bahwa suatu tindakan atau keputusan yang diambil akan mempunyai konsekuensi kepada orang lain.

- *Moral agent*

Yaitu seseorang yang membuat keputusan moral (*moral decision*).

- Keputusan etis (*ethical decision*)

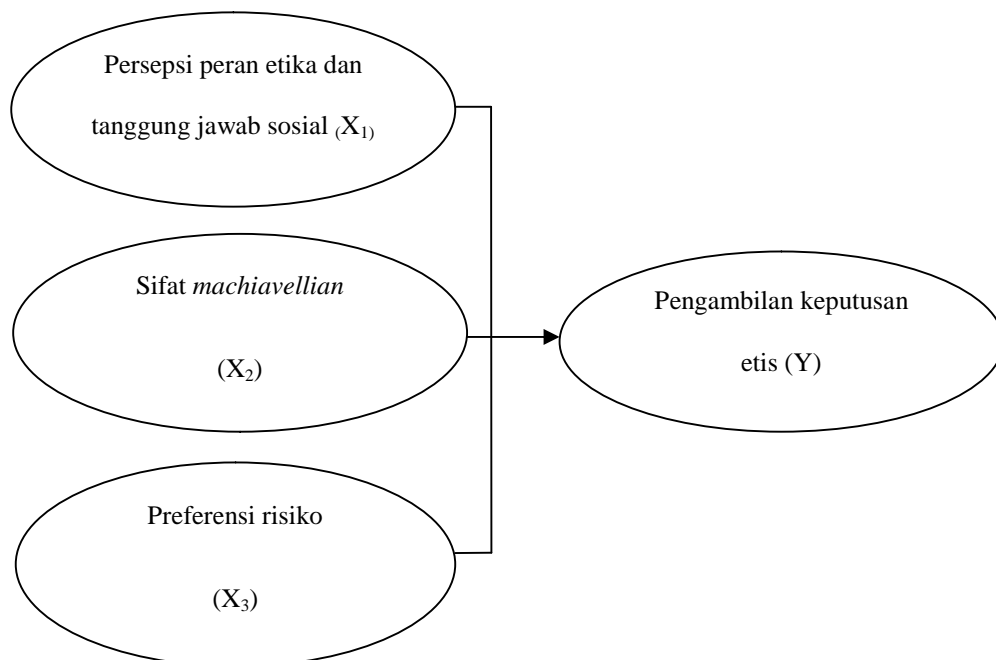
Yaitu sebuah keputusan yang secara legal dan moral dapat diterima oleh masyarakat luas.

Fishbein dan Ajzen (1975) dalam Jiwo (2011) menyatakan bahwa sikap seseorang terhadap suatu tindakan, bersama dengan norma subyektifnya terhadap setiap tindakan, bersama dengan norma subyektifnya terhadap tindakan tersebut, akan mempengaruhi pertimbangan individual atas setiap pilihan tindakan. Pada tindakan-tindakan tertentu, seseorang akan memilih solusi terbaik atas setiap masalah yang muncul. Dalam teori ini, sikap (*attitude*) adalah hasil dari keyakinan dan nilai atas suatu tindakan, sedangkan norma subyektif (*subjective norms*) merupakan keyakinan seseorang terhadap tindakan-tindakan yang mungkin diambil oleh orang lain. Tindakan tersebut terbentuk setidaknya memenuhi kedua kriteria, baik *attitude* maupun *subjective norms*. Oleh karena itu, setiap pertimbangan pengambilan keputusan dipengaruhi oleh sikap individual dan norma subyektif yang dimilikinya.

Rest (1983) dalam Chan (2006) mengungkapkan sebuah model kognitif komprehensif pembuatan keputusan etis atau dikenal dengan model empat komponen. Rest (1983) memposisikan bahwa untuk berperilaku secara moral, seorang individu harus dapat bertindak sesuai empat dasar proses psikologis sebagai berikut:

- a. *moral sensitivity*, menginterpretasikan situasi.
- b. *moral judgement*, memutuskan suatu tindakan benar atau salah secara moral.
- c. *moral motivation*, mengutamakan nilai moral secara relatif daripada nilai yang lain.
- d. *moral character*, memiliki sifat, keinginan untuk menunjukkan tindakan moral.

B. Kerangka Pemikiran



C. Hipotesis

Dalam Sugiyono (2012: 64) mengungkapkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Ada dan tegaknya etika profesi merupakan hal penting yang harus dikuasai konsultan pajak. Seperti yang diungkapkan Loen dan Meliana (2009: 19) bahwa seorang konsultan pajak harus tunduk pada kode etikanya. Tentunya seorang konsultan pajak yang memahami etika profesinya akan dapat memahami etika dan tanggung jawab sosial karena seperti yang dikatakan Schwartz (2001) dalam Ludigdo (2007: 42) bahwa etika profesi disusun berdasarkan standar moral universal, sehingga dapat membuka jalan / membuka kesadaran diri untuk mengambil keputusan etis. Dalam Shafer dan Simmons (2008), profesional pajak yang meyakini bahwa kepentingan utama perusahaan adalah pemegang saham saja dan hanya berorientasi meningkatkan laba perusahaan tanpa memperhitungkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat, maka profesional pajak tersebut akan menganggap wajar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Seperti disebutkan dalam Standar Profesi Konsultan Pajak (SPKP) dalam IKPI (2010) bahwa konsultan pajak tidak boleh hanya mementingkan kepuasan kliennya saja.

Pengaruh persepsi etika dan tanggung jawab sosial terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak

Ada dan tegaknya etika profesi merupakan hal penting yang harus dikuasai konsultan pajak. Seperti yang diungkapkan Loen dan Meliana (2009: 19) bahwa seorang konsultan pajak harus tunduk pada kode etikanya. Tentunya seorang konsultan pajak yang memahami etika profesinya akan dapat memahami etika dan tanggung jawab sosial karena seperti yang dikatakan Schwartz (2001) dalam Ludigdo (2007: 42) bahwa etika profesi disusun berdasarkan standar moral universal, sehingga dapat membuka jalan / membuka kesadaran diri untuk mengambil keputusan etis. Dalam Shafer dan Simmons (2008), profesional pajak yang meyakini bahwa kepentingan utama perusahaan adalah pemegang saham saja dan hanya berorientasi meningkatkan laba perusahaan tanpa memperhitungkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat, maka profesional pajak tersebut akan menganggap wajar penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Seperti disebutkan dalam Standar Profesi Konsultan Pajak (SPKP) dalam IKPI (2010) bahwa konsultan pajak tidak boleh hanya mementingkan kepuasan kliennya saja.

H₁: Persepsi peran etika dan tanggung jawab sosial berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan etis.

Pengaruh sifat *machiavellian* terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak

Seperti yang telah diuraikan di atas, dibandingkan dengan orang tipe mach rendah, orang tipe mach tinggi memberi prioritas tinggi uang, kekuasaan, dan

persaingan sedangkan prioritas relatif rendah untuk membangun komunitas, cinta-diri, dan keluarga. Selain itu, orang mach tinggi memiliki cara pandang adalah *goal-oriented* bukan *process-oriented* sehingga dalam mencapai tujuannya lebih menyukai jalan pintas. Orang tipe mach tinggi pun memiliki keinginan yang tinggi untuk melakukan manipulasi. Sehingga dengan sifat *machiavellian* yang tinggi, konsultan pajak akan melakukan rekayasa / manipulasi dalam membantu wajib pajak melakukan penghindaran pajak.

H₂ : Sifat *machiavellian* berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan etis.

Pengaruh preferensi risiko terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak

Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (2003) yang dikutip Adriana (2013:6) menyatakan bahwa kecenderungan mengambil risiko adalah satu aspek yang sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Seorang pengambil keputusan yang cenderung enggan mengambil risiko akan menentukan sasaran yang berbeda, mengevaluasikan alternatif secara berbeda, dan menyeleksi alternatif yang berbeda dari apa yang akan dilakukan pengambil keputusan lain dalam situasi yang serupa. Individu yang enggan mengambil risiko akan berusaha melakukan pilihan yang kadar risiko atau ketidakpastiannya rendah, atau kadar kepastian tentang hasilnya tinggi.

H₃ : Preferensi risiko berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan etis

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pemilihan Obyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menurut Irawan (2006), dalam konteks ilmu alam (eksakta) kata kuantitatif jelas sekali berhubungan dengan angka (kuantita), baik hasil pengukurannya, analisis datanya, maupun penafsiran dan penarikan kesimpulannya, semuanya dalam bentuk angka. Tetapi dalam ilmu sosial, banyak sekali hasil pengukuran terhadap variabel penelitian sangat bersifat kualitatif dan arbitrer, meskipun bentuk luarnya adalah angka. Ternyata, apa yang dimaksud kuantitatif disini sebenarnya lebih mengacu kepada “keakuratan” deskripsi setiap variabel dan keakuratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kesimpulannya, kebenaran dalam penelitian kuantitatif (ilmu sosial) adalah kebenaran ilmiah yang diperoleh melalui deskripsi akurat tentang suatu variabel dan hubungan antar variabel, dan memiliki daya generalisasi yang baik, meskipun dalam deskripsi dan generalisasi ini tidak digunakan angka.

B. Metode Penarikan sampel

Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 25 november sampai dengan tanggal 25 desember, konsultan pajak di wilayah jakarta.

1. Jenis data

Data deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa keterangan yang mendukung penulisan ini yang sifatnya deskriptif yang dapat

diperoleh dari dokumen/arsip perusahaan berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, serta *job description*.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder merupakan data yang diambil dari penelitian-penelitian terdahulu / buku pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Operasionalisasi variabel

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu etika dan tanggung jawab sosial (X_1), sifat machiavellian (X_2), dan preferensi risiko (X_3), dan satu variabel dependen yaitu pengambilan keputusan etis (Y). Variabel independen pertama adalah etika dan tanggung jawab sosial (X_1), indikator dari persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial (X_1) adalah: (1) Konsultan pajak bertanggung jawab atas profesinya; (2) Konsultan pajak selalu sopan dan ramah; dan (3) Konsultan pajak mematuhi kode etik. Variabel persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial akan diukur dengan cara menyebarkan kuesioner dengan menggunakan skala Likert dari interval 1 (sangat tidak setuju) hingga interval 5 (sangat setuju).

Variabel independen yang kedua adalah sifat machiavellian (X_2) merupakan sifat individu yang manipulatif, menggunakan tindakan persuasif untuk mencapai tujuan pribadi, dan pada umumnya agresif. Tingkat kecenderungan sifat Machiavellian diukur dengan sebuah skala pengukuran Mach IV yang terdiri dari 27 item pertanyaan dan menggunakan 5 poin skala Likert (skor 5 sangat setuju – skor 1 sangat

tidak setuju). Semakin tinggi skor Mach IV berarti semakin tinggi tingkat sifat Machiavellian responden.

Variabel independen yang ketiga adalah preferensi risiko (X_3) merupakan seberapa besar risiko yang bersedia diambil oleh konsultan pajak. Preferensi risiko diukur dengan skala nominal dan diberikan dua pertanyaan sebagaimana yang digunakan dalam penelitian Killian dan Doyle (2004) yaitu penilaian responden mengenai tingkat preferensi risiko, apakah dapat menerima risiko yang lebih tinggi dari rata-rata konsultan pajak atau lebih rendah, serta kesediaan responden untuk mengambil risiko yang lebih jauh demi kepentingan klien.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengambilan keputusan etis (Y). Pembuatan keputusan tidak terlepas dari keterlibatan etika, karena pertimbangan etis merupakan sebuah kriteria dalam pembuatan keputusan organisasional (Robbins, 2008). Individu dengan standar etika yang tinggi kemungkinan besar tidak terlibat dalam perbuatan tidak etis, bahkan dalam organisasi atau situasi di mana terdapat tekanan yang kuat untuk menyesuaikan diri. Jones (1991) mendefinisikan keputusan etis (ethical decision) sebagai sebuah keputusan yang baik secara moral maupun legal dapat diterima oleh masyarakat luas. Indikator dari pembuatan keputusan etis (Jones, 1991) adalah sebagai berikut: (1) Isu Moral; (2) Pertimbangan Moral; dan (3) Perilaku Moral. Variabel keputusan etis diukur dengan menggunakan skala Likert dari interval 1 (sangat tidak setuju) hingga interval 5 (sangat setuju).

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Kuesioner digunakan untuk mengetahui apakah konsultan pajak di wilayah Jakarta memiliki sifat *machiavellian* dan bekerja sesuai etika yang dilakukan dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan yang mewakili keseluruhan aspek yang menjadi objek penelitian.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2001:55), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Sampel dari penelitian yang akan digunakan penulis adalah Kantor Konsultan Pajak Wilayah Jakarta sebanyak 7 (tujuh) KKP.

D. Teknik Pengolahan Data

Dalam hal ini, penulis akan menguji apakah konsultan pajak yang ada di wilayah Jakarta memiliki etika dan tanggung jawab sosial, sifat *machiavellian* dan preferensi risiko dalam konsultan pajak di wilayah Jakarta bekerja dengan sesuai profesinya.

1. Statistik deskriptif

Menurut Ghazali (2012:19) statistik deskriptif dapat memberikan gambaran atau dekripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran ringkasan variabel-variabel yang akan diteliti.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

- Uji Validitas

Mengingat pengumpulan data dilakukan dengan kuisisioner, maka kualitas kuisisioner dan kesanggupan responden dalam menjawab pertanyaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kesimpulan dari hasil penelitian tergantung pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Ada dua syarat penting yang berlaku pada sebuah kuisisioner yaitu harus valid dan reliabel (Sunyoto, 2011: 68).

Data penelitian tidak akan berguna jika instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki *reability* (tingkat keandalan) dan *validity* (tingkat keabsahan) yang tinggi. Uji validitas dan reabilitas dalam penelitian ini menggunakan *software* aplikasi statistik *Statistical Package for Social Science (SPSS)*.

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau sahny suatu instrumen. Suatu intrumen yang valid atau sah mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memilki validitas rendah. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Sunyoto, 2011:69).

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor

total dengan menggunakan metode *Product Moment Pearson Correlation*. Data dinyatakan valid jika nilai hitung yang merupakan nilai dari *Corrected item-total Correlation* dari tabel signifikan 0.05 (5%).

- Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel maka dilakukan uji statistik dengan cara melihat *Cronbach Alpha* (). Kriteria yang digunakan adalah suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2011:48).

3. Uji Asumsi Klasik

Menurut Burhan (2015 : 46) Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Uji asumsi klasik dibutuhkan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi berganda yang dilakukan telah terdistribusi secara normal (normalitas) dan benar-benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, multikolonieritas, dan autokorelasi. Untuk itu diperlukan uji asumsi klasik terhadap persamaan model analisis regresi yang telah dihasilkan yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

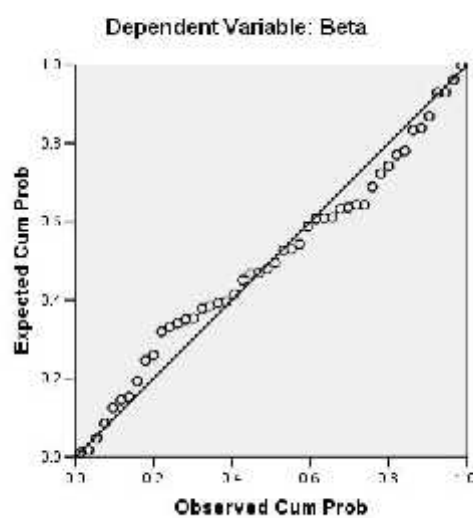
a. Uji normalitas.

Menurut Ghozali dalam Mory (2015 : 12) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual memiliki distribusi

normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel independen dan data variabel dependen berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan melakukan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Dasar pengambilan keputusan terhadap uji *kolmogorov-smirnov* adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan model regresi tersebut berdistribusi normal, dan persyaratan data disebut tidak memenuhi persyaratan uji normalitas jika nilai signifikansi kurang dari 0,05.

Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Gambar berikut ini merupakan contoh grafik uji normalitas:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 3.1 Grafik Uji Normalitas

b. Uji multikolinieritas

Menurut Ghazali dalam Mory (2015: 13) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dengan cara melihat nilai *tolerance* dan lawannya serta melihat *besaran Variance Inflation Factor (VIF)*. Pada umumnya, jika nilai *tolerance* < 0,10 dan nilai *VIF* > 10, maka variabel tersebut memiliki permasalahan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya.

c. Uji heteroskedastisitas

Menurut Ghazali dalam Mory (2015 : 13) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut ghazali uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot dengan dasar analisis adalah sebagai berikut:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan grafik scatterplot, titik titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y namun terdapat beberapa titik yang menumpuk dan membentuk garis diagonal. Untuk memastikan terjadi heteroskedastisitas atau tidak maka dilakukan uji Glejser.

4. Uji Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen pada penelitian ini adalah etika dan tanggung jawab sosial (X_1), sifat machiavellian (X_2), dan preferensi risiko (X_3). Sedangkan variabel dependen dari penelitian ini adalah pengambilan keputusan etis (Y). Jadi dapat dirumuskan persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Pengambilan keputusan etis

α = Konstanta

X_1 = Etika dan tanggung jawab sosial

X_2 = Sifat machiavellian

X_3 = Preferensi risiko

e = Error

β_{1-4} = Koefisien regresi, yaitu besarnya perubahan Y apabila X berubah satu satuan

E. Teknik Pengujian Hipotesis

Dalam suatu penelitian, peneliti harus mendapatkan sebuah jawaban. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan pengujian hipotesis. Hipotesis bersifat sementara dan hanya merupakan sebuah dugaan dan harus diuji kebenarannya. Jadi, semua hipotesis yang telah dibuat dalam penelitian harus diuji

kebenarannya untuk mendapatkan jawaban. Pengujian hipotesis dilakukan secara simultan (Uji F), dan secara parsial (Uji t). Kemudian akan dilakukan juga uji koefisien determinasi.

Menurut Ghozali (2012:98), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Pengujian menggunakan tingkat keyakinan 95% dan tingkat signifikan 0,05 (5%). Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Artinya, apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a dapat diterima dan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak.

Menurut Ghozali (2012:98), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan jumlah seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat keyakinan 95% dan tingkat signifikan 0,05 ($=5\%$). Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis dilakukan sebagai berikut (Ghozali, 2012:99) jika jumlah *degree of freedom (df)* adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 dapat ditolak. Dengan kata lain menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Artinya, apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a dapat diterima dan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak.

Koefisien determinasi ($Adj R^2$) merupakan uji yang mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi berada pada angka 0 sampai 1. Menurut Santoso (2010:168) nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai R^2 yang mendekati angka 1 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.